
Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono

Desy Dwi Anjarwati¹; Hary Priyanto²; Niko Pahlevi Hentika³

¹²³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; Indonesia

correspondence e-mail*, desydwi1327@gmail.com¹, harysangabi@gmail.com²,
nikopahlevi@gmail.com³

Submitted:

Revised: 01-07-2023

Accepted: 10-07-2023

Published: 20-07-2023

Abstract

Implementation of the Banyuwangi Response Stunting Program in Srono District, because the prevalence reached 6.98% and placed it as the 3rd highest rank in Banyuwangi Regency. The highest supplier is Wonosobo Village. The high stunting rate is because many people and including stakeholders think stunting is only about heredity, so it's considered normal. Objective: To describe, analyze, and interpret the implementation of the Banyuwangi Respond Stunting program to the people of Wonosobo Village. Method: Using qualitative principles according to constructive and participatory models. Primary data from interview results, and secondary data from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Result: It is difficult to reduce stunting due to ineffective prevention programs, not optimal coordination related to planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation, ineffective and efficient allocation and utilization of resources and sources of funds, as well as minimal assistance and outreach regarding the prevention and treatment of stunting. Conclusion: Giving all the rights of people who are vulnerable to stunting as referred to in the Banyuwangi Respond Stunting program is very important.

Keywords

Apparatus Service Quality; Banyuwangi, Stunting



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Banyuwangi Tanggap Stunting merupakan program pembangunan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna mengentaskan stunting dengan meningkatkan ketahanan pangan dan asupan gizi untuk anak stunting dan ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan.

Stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita dimana panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibadingkang dengan tinggi badan sesuai usianya. Kondisi tersebut diketahui dari pengukuran panjang atau tinggi badan pada balita yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak menurut World Health Organization. Realitas stunting merupakan 1 dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menghilangkan kelaparan

dan mencapai ketahanan pangan dan asupan nutrisi yang lebih baik..

Terdapat 5 langkah dalam Program Banyuwangi Tanggap Stunting: 2 basis dan 3 pilar. Basis terdiri dari (1) membangun kolaborasi dengan semua pihak, dan (2) mendukung upaya-upaya penanggulangan stunting guna mencapai Banyuwangi zero stunting. Sementara pilarnya yaitu (1) identifikasi stunting mulai dari nama, alamat, dan masalah yang dikeluhkan. (2) perbaiki masalah yang timbul melalui indentifikasi masalah-masalah yang dikeluhkan. Dan (3) melakukan pengukuran secara berkala tumbuh kembang anak mulai dari janin hingga 1000 hari pertama kelahiran.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 wilayah administratif berbentuk kecamatan. Kebijakan program Banyuwangi Tanggap Stunting diselenggarakan di setiap kecamatan, diantaranya Kecamatan Srono. Terdapat 3 Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Srono, yaitu bertempat di Desa Kebaman, di Desa Parijatah Kulon, dan di Desa Wonosobo.

Program Banyuwangi Tanggap Stunting diselenggarakan di berbagai tempat pelayanan kesehatan di Kecamatan Srono, diantaranya yaitu berada di Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosobo. Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosobo memiliki 3 (tiga) daerah administratif yaitu: Desa Rejoagung, Desa Bagorejo, dan Desa Wonosobo. Desa Wonosobo memiliki kasus stunting tertinggi se Kecamatan Srono. Prevalensi stunting yang mencapai 6,98% menempatkan Kecamatan Srono sebagai peringkat 3 se-Kabupaten Banyuwangi.

Program Banyuwangi Tanggap Stunting di implementasi secara masif dan mendapat dukungan anggaran. Akan tetapi tidak berarti bebas masalah. Oleh karenanya pengawasan dan evaluasi pada tiap kebijakan yang ditetapkan merupakan hal penting.¹

Sosialisasi terbatas dan hanya melakukan tindakan pada anak seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan pemberian bubur ayam tanpa diberikan sosialisasi merupakan kendala atas pemahaman masyarakat terhadap stunting. Jikapun ditemukan anak dengan gejala stunting, pulangny diberi biskuit dan susu. Harusnya mendapat 2 susu namun nyatanya hanya di beri 1 susu.

Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68/2020 menjelaskan bahwa Program Banyuwangi Tanggap Stunting untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan secara nyata yang dilakukan di lapangan oleh implementator dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh sasaran.

Kepentingan oknum mampu menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun tujuan

¹ Hary Priyanto et al., "Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021).

dari program yang ditetapkan.² Keterlibatan semua sektor. Permana dan Izzati (2020) menyampaikan bahwa transparansi dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipatif masyarakat dalam program pencegahan stunting sehingga membentuk komunikasi atau interaksi yang interaktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diimpikan.³

Artikel ilmiah ini mengulas tentang implementasi program Banyuwangi Tanggap Stunting pada masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Analisis dan hasil di dapat dari hasil pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

METODE

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya.⁴ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang: implementasi program Banyuwangi Tanggap Stunting pada masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan di Desa Wonosobo Kecamatan Srono sejak Oktober 2022 hingga Agustus 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan *purposive sampling*; data sekunder di dapat melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Program Banyuwangi Tanggap Stunting Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo

Kebijakan dalam bentuk program Banyuwangi Tanggap Stunting sebagai penjabar bahwa mengentaskan dan mencegah stunting merupakan masalah bersama. Berbagai upaya dalam mencukupi segala kepentingan masyarakat telah dilakukan pemerintah dalam wujud kebijakan

² Hary Priyanto and Nana Noviana, "Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi," *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* 22, no. 2 (2023): 206–20.

³ Iip Permana and Ulfia Izzati, "Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Berbasis E-Government (Studi Kasus: Inovasi Ayo Ceting Di Puskesmas Andalas)," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (2020): 25–37.

⁴ J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, "Research Design, Kualitatif and Mixed Methods Approaches. Second" (Sage Publications, 2014).

dan program-program yang bersifat langsung maupun tidak langsung.⁵

Tingginya angka stunting karena tidak efektifnya program pencegahan, tidak optimalnya koordinasi terkait perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi, tidak efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, serta minim pendampingan dan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68/2020 merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk mengentaskan kasus stunting, mencegah stunting, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan adalah tahap yang krusial dari ditetapkannya kebijakan⁶, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.⁷ Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan rapi jika tidak di implementasi.

Kebijakan dalam bentuk program Banyuwangi Tanggap Stunting yang merupakan penanggulangan stunting di Kabupaten Banyuwangi harus di implementasi dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat. Jika tidak di implementasi maka kebijakan tersebut akan menjadi sia.⁸

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan organisasi pelayanan publik dalam hal kesehatan, yang berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, dan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama Mubarak & Chayatin.⁹

Sebagai organisasi pelayanan publik, segenap aparatur dalam Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo perlu mengoptimalkan perannya sehingga mencapai keberhasilan dalam penurunan stunting. Hal tersebut menjadi titik tekan karena stunting telah menjadi isu agenda

⁵ Priyanto and Noviana, "Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi."

⁶ Nana Noviana and Hary Priyanto, "Proactive Personality a Transformational Leader Is Consistent in Maintaining Organizational Balance," *Partners Universal International Research Journal* 2, no. 2 (2023): 275–81.

⁷ Royatul Firdaus, Hary Priyanto, and Erna Agustina, "CRITICAL STUDY ON POLICY IMPLEMENTATION OF WITHDRAWAL OF PROVINCIAL ROAD RETRIBUTIONS BY THE GOVERNMENT OF TAMANSARI VILLAGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION 97/2012," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 306–12.

⁸ Nadya Ayu Putri Hidayat, Hary Priyanto, and Erna Agustina, "STUDY OF ONLINE SINGLE SUBMISSION-BASED INTEGRATED SERVICE IMPLEMENTATION IN BANYUWANGI DISTRICT," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023): 1496–1503.

⁹ Nor Sanah, "Pelaksanaan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser," *Journal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (n.d.).

utama yang mendunia.

Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo merupakan organisasi fungsional yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yaitu: pengembangan pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pelayanan secara menyeluruh, terpadu, dan merata, dapat diterima dan terjangkau masyarakat. Upaya pengembangan pelayanan kesehatan berpijak pada pelayanan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, masyarakat serta lingkungan sesuai dengan wilayah kerjanya.¹⁰

Peran Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan kesehatan. Ernest Dale menyampaikan organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Memaknai hal tersebut maka keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat berfungsi sebagai pelayan kesehatan masyarakat.¹¹

Hakekat pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Wonosobo secara menyeluruh dan berkualitas tinggi yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sistem manajemen pemerintahan berfungsi untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya memenuhi keinginan dan mencukupi kebutuhan masyarakat.¹² Oleh karenanya dalam hal pengelolaan harus sesuai dengan peraturan yang ada serta harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Pelatihan kepada semua pihak untuk terlibat dalam bimbingan, pendampingan, serta pengawasan pada masyarakat rentan stunting dapat mempercepat penurunan angka stunting.

Pentingnya partisipasi karena fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga yang selalu berupaya mendorong masyarakat, perorangan, keluarga, dan para pelaku usaha untuk memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk selalu hidup sehat, berperan aktif dalam kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaan, ikut serta dalam menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program

¹⁰ Ito Riris Immasari and Sofia Dara Sari, "Perancangan Sistem Informasi Keluhan Pasien Pada Puskesmas Kelurahan Paseban," *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta* 1, no. 2 (2021): 86–101.

¹¹ Noviana and Priyanto, "Proactive Personality a Transformational Leader Is Consistent in Maintaining Organizational Balance."

¹² Priyanto Hary, "Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi," 2018.

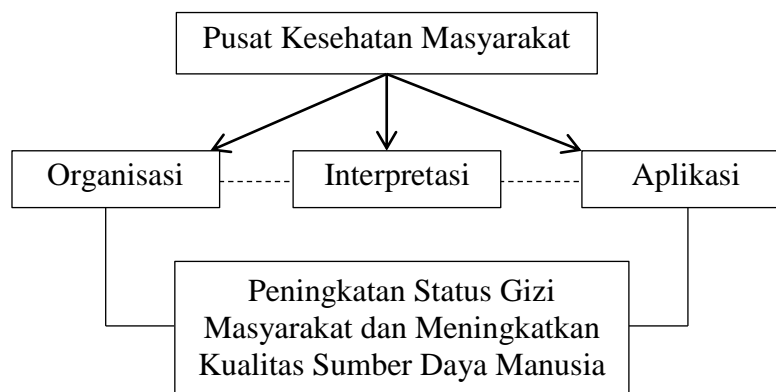
kesehatan.

Analisis Optimalisasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting

Stunting dapat berimbas pada perkembangan daerah tentunya pada kualitas sumber daya manusia. Anak-anak stunting akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan rentan mengalami penyakit degeneratif yaitu penyakit yang muncul seiring pertambahan usia seperti diabetes mellitus, hipertensi, hingga rentan mengidap obesitas ketika dewasa.

Peneliti dalam menganalisis fenomena stunting di Desa Wonosobo menggunakan pendekatan organisasi, interpretasi, dan aplikasi sebagaimana pemikiran Charles O. Jones.

Bagan 1. Diskursus Optimalisasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting



Sumber: Dikelola dari pemikiran Charles O. Jones

Pertama, aspek organisasi. Jones menyampaikan organisasi yakni pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.¹³

Aspek organisasi menjadi hal penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan karena dalam pelaksanaannya harus ada organisasi atau lembaga yang menjalankan. Pada aspek organisasi sumber daya dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Sumber daya tersebut meliputi tenaga kerja yang cukup dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya; sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang pelaksanaan kebijakan; serta dana yang cukup untuk mendukung

¹³ Charles O. Jones, "Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada, 1996.

keberhasilan implementasi kebijakan.

Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo sebagai organisasi dalam pelaksanaan kebijakan program Banyuwangi Tanggap Stunting wajib menanggulangi stunting di Desa Wonosobo. Oleh karenanya pembagian tugas dari tiap divisi dalam organisasi, baik sumber daya pelaksana, keuangan serta sarana prasarana harus tertata dengan baik.¹⁴

Pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan dengan menentukan sasaran kegiatan pencegahan yang terdiri atas: sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan sasaran untuk intervensi gizi sensitif.

Sasaran untuk intervensi gizi spesifik meliputi: remaja putri; wanita usia subur; ibu hamil; ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 24 bulan; anak usia 0 sampai dengan 23 bulan serta anak balita usia 24 sampai 59 bulan. Sedangkan sasaran untuk intervensi gizi sensitif yaitu masyarakat umum khususnya keluarga. Berkaitan dengan sasaran yang ditentukan, sumber daya Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo harus memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan dalam implementasi program Banyuwangi Tanggap Stunting.

Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo merupakan organisasi atau lembaga birokrasi dimana di dalam organisasi tersebut memiliki unit-unit organisasi bisa disebut dengan struktur. Struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda dalam suatu organisasi.¹⁵

Hasil lapangan menjelaskan struktur pada Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo memiliki tujuan mengorganisir tugas-tugas dan untuk mengkomunikasikan tugas antara anggota maupun atasan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran organisasi. Penataan struktur organisasi diatur oleh aturan yang jelas sehingga dapat membatasi wewenang fungsi, bagian atau posisi para pelaksana agar tidak saling tumpang tindih dalam melaksanakan program yang telah ditentukan.

Pentingnya penataan struktur organisasi karena metode pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan melalui: kemandirian keluarga, gerakan masyarakat

¹⁴ Hary, "Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi."

¹⁵ Aldrin Ponto and Femmy Tasik, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 20 (2016): 36-52.

hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, pos pelayanan terpadu, dan perilaku hidup bersih dan sehat.¹⁶

Kedua, aspek interpretasi. Aspek ini penting dalam melaksanakan program Banyuwangi Tanggap Stunting. Karena interpretasi merupakan penafsiran agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.¹⁷

Interpretasi dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program Banyuwangi Tanggap Stunting merupakan kegiatan penafsiran atau penjelasan substansi dari kebijakan yang ada dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Interpretasi pada program Banyuwangi Tanggap Stunting agar mengaktifkan para pelaksana dalam memberikan pemahaman secara lengkap, tepat, dan jelas pada sasaran kebijakan. Karena jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penafsiran terhadap program Banyuwangi Tanggap Stunting akan berakibat pada tujuan dari implementasi kebijakan publik tersebut tidak tercapai.

Kemampuan menginterpretasi dengan baik dapat menjelaskan bahwa keberhasilan program Banyuwangi Tanggap Stunting memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya stunting. Hasil lapangan menjelaskan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo sudah cukup baik dan tepat.

Interpretasi yang baik dapat membentuk kesadaran bersama bahwa pencegahan maupun penanganan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Oleh karenanya konsistensi dalam melaksanakan kebijakan, yang diantaranya melalui sosialisasi secara masif dan tepat sasaran, serta dan kejelasan tugas para pelaksana dapat menunjang tingkat keberhasilan misi dalam menurunkan stunting pada masyarakat Desa Wonosobo. Minimal satu persen setiap tahunnya.

Ketiga, aspek Aplikasi. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau sukses dilihat dari aspek aplikasinya. Apakah kebijakan tersebut telah diterapkan atau hanya sebatas tumpukan kertas belaka?

Program Banyuwangi Tanggap Stunting jika tidak diaplikasikan maka tidak akan memenuhi target yang ditentukan. Ketentuan rutin dari aplikasi, baik tentang pelayanan, pembayaran atau lainnya harus disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.¹⁸

¹⁶ "Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" (n.d.).

¹⁷ Jones, "Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta."

¹⁸ Jones.

Mendasari hal tersebut, aspek aplikasi bergantung dari pelayanan yang telah diberikan atau dilaksanakan oleh para pelaksana program dan seberapa rutin pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat.

Pelaksana Program Banyuwangi Tanggap Stunting di Desa Wonosobo harus patuh pada strategi yang telah ditentukan. Karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan karena adanya pelayanan tidak adil, tidak berkualitas, tidak beretika.¹⁹

Hasil lapangan menjelaskan banyak masyarakat dan termasuk stakeholder yang tidak memahami mengenai stunting, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut karena adanya pemahaman bahwa penyebab stunting adalah keturunan, sehingga dianggap lumrah. Berdasar realitas tersebut, strategi utama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi secara komprehensif dan massif, baik melalui media masa, maupun komunikasi dan sosialisasi kepada keluarga, terutama pada ibu dan calon ibu, serta melakukan advokasi secara berkelanjutan.

Selain daripada itu ditemukan aplikasi pelayanan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosobo belum memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengalami kasus stunting, karena berkurangnya bantuan terhadap masyarakat terdampak stunting. Oleh karenanya pihak Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo perlu transparan dan meningkatkan pelayanan agar keadilan pelayanan kesehatan dapat dirasakan atau memuaskan masyarakat.

Analisis berdasarkan aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi sebagai penguat terhadap pentingnya program Banyuwangi Tanggap Stunting di tengah masyarakat. Oleh karenanya semua pihak harus bergandengan tangan dalam menekan angka stunting sebagaimana target kebijakan, sekaligus penguatan pada kualitas kepemimpinan, kerjasama tim, partisipasi, hingga komunikasi.

KESIMPULAN

Sulitnya menurunkan stunting karena tidak efektifnya program pencegahan, tidak optimalnya koordinasi terkait perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi, tidak efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, serta minim pendampingan dan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan stunting.

¹⁹ Nana Noviana Nadarsyah and Hary Priyanto Priyanto, "Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership," in *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (IGI Global, 2022), 108–23.

REFERENSI

- Creswell, J. W., and V. L. Plano Clark. “Research Design, Qualitatif and Mixed Methods Approaches. Second.” Sge Publications, 2014.
- Firdaus, Royatul, Hary Priyanto, and Erna Agustina. “CRITICAL STUDY ON POLICY IMPLEMENTATION OF WITHDRAWAL OF PROVINCIAL ROAD RETRIBUTIONS BY THE GOVERNMENT OF TAMANSARI VILLAGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION 97/2012.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 306–12.
- Hary, Priyanto. “Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi,” 2018.
- Hidayat, Nadya Ayu Putri, Hary Priyanto, and Erna Agustina. “STUDY OF ONLINE SINGLE SUBMISSION-BASED INTEGRATED SERVICE IMPLEMENTATION IN BANYUWANGI DISTRICT.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023): 1496–1503.
- Immasari, Ito Riris, and Sofia Dara Sari. “Perancangan Sistem Informasi Keluhan Pasien Pada Puskesmas Kelurahan Paseban.” *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta* 1, no. 2 (2021): 86–101.
- Jones, Charles O. “Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada*, 1996.
- Nadarsyah, Nana Noviana, and Hary Priyanto Priyanto. “Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership.” In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective*, 108–23. IGI Global, 2022.
- Noviana, Nana, and Hary Priyanto. “Proactive Personality a Transformational Leader Is Consistent in Maintaining Organizational Balance.” *Partners Universal International Research Journal* 2, no. 2 (2023): 275–81.
- Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (n.d.).
- Permana, Iip, and Ulfia Izzati. “Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Berbasis E-Government (Studi Kasus: Inovasi Ayo Ceting Di Puskesmas Andalas).” *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (2020): 25–37.
- Ponto, Auldrin, and Femmy Tasik. “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.” *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 20 (2016): 36–52.
- Priyanto, Hary, and Nana Noviana. “Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi.” *Majalah Ilmiah Dian Ilmu* 22, no. 2 (2023): 206–20.
- Priyanto, Hary, Bambang Soepeno, Edy Wahyudi, and Abubakar Eby Hara. “Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021).
- Sanah, Nor. “Pelaksanaan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (n.d.).